



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan I
2020



Penyusun :

Penanggung Jawab : Supendi || Ketua Tim : Darmawan || Editor : Ahmad Yani,
Hendra Gunawan, Deni Rusdijaman || Desain Grafis : Achmad Shafiq Bafadhal ||
Penyusun : Tim KFR PPA II Kanwil DJPb Provinsi Jambi

KANWIL DJTJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi untuk Triwulan I Tahun 2020 ini. Kajian ini merupakan salah satu *output* unggulan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di Provinsi Jambi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun yang menyelesaikan laporan ini. Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini.

Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini. Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik, saran dan masukan agar kajian ini dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini.

*“Kalau memancing di batang hari
Pastilah banyak mendapat ikan
Selamat membaca KFR kami
Salah dan kurang mohon dimaafkan”*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jambi, 14 Mei 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

Supendi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
<i>Executive Summary</i>	v
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
B. Neraca Perdagangan Internasional.....	1
C. Inflasi	2
D. Indikator Kesejahteraan	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	4
A. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara	4
B. Pendapatan Negara	5
C. Belanja Negara	7
D. Pengelolaan BLU	8
E. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	9
F. Prognosis Realisasi APBN	10
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	11
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	11
B. Pendapatan Daerah	12
C. Belanja Daerah	15
D. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020	16
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD).....	17
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	17
B. Pendapatan Konsolidasian.....	17
C. Belanja Konsolidasian	20
V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	24
Sektor Perkebunan Sebagai Salah Satu Sektor Unggulan Provinsi Jambi	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi 2019 - 2020	1
Grafik 2 Ekspor – Impor Triwulan I 2020.....	1
Grafik 3 Rata-rata Tingkat Inflasi Tahun 2019 – 2020.....	2
Grafik 4 TPT Jambi Tahun 2019-2020	3
Grafik 5 TPT Menurut Pendidikan.....	3
Grafik 6 Realisasi PPh Triwulan I Tahun 2019 – 2020	5
Grafik 7 Realisasi PPN Triwulan I Tahun 2019 – 2020.....	5
Grafik 8 Realisasi Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2019 – 2020	5
Grafik 9 Sebaran Penerimaan Pajak & Bea dan Cukai Triwulan I Tahun 2020	6
Grafik 10 Realisasi PNBP 2019 – 2020 di Provinsi Jambi.....	6
Grafik 11 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat.....	7
Grafik 12 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	7
Grafik 13 Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Jambi	8
Grafik 14 Pagu dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Pemda	12
Grafik 15 Pagu dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Pemda	12
Grafik 16 Pagu dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda.....	13
Grafik 17 Pagu dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda.....	13
Grafik 18 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Januari 2019 – Maret 2020.....	14
Grafik 19 Komposisi Dana Perimbangan (Agregat).....	14
Grafik 20 Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Agregat)	15
Grafik 21 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja per Pemda.....	15
Grafik 22 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi s.d. Triwulan I TA 2020 dan 2019.....	18
Grafik 23 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi	18
Grafik 24 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan I 2020.....	19
Grafik 25 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2016 s.d. 2020	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan I Tahun 2020 dan 2019	4
Tabel 2 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020	9
Tabel 3 Penyaluran KUR Regional Sumatera	9
Tabel 4 Proyeksi APBN pada Prov. Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2020	10
Tabel 5 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I TA 2019 dan 2020	11
Tabel 6 Proyeksi APBD (agregat) Provinsi Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2020	16
Tabel 7 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2020 dan 2019	17
Tabel 8 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 dan 2019.....	19
Tabel 9 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 dan 2019.....	20
Tabel 10 Data Belanja, PMTB dan PDRB Triwulan I 2020	22

Executive **S**ummary

Perekonomian Jambi tumbuh 1,65%, PDRB sebesar Rp53.703 Miliar (ADHB)

Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 1,65% terhadap triwulan I 2019. PDRB Provinsi Jambi tercatat sebesar Rp53.703 Miliar (ADHB).

Rata-rata inflasi triwulan I Kota Jambi 0,3% & Muara Bungo 0,18%

Inflasi (mtm) mengalami penurunan atau deflasi pada triwulan I Tahun 2020 ini. Untuk kota Jambi indeks inflasi pada bulan Maret 2020 adalah sebesar -0,65% dan Muara Bungo sebesar -0,56%. Rata-rata inflasi triwulan I untuk Kota Jambi adalah 0,3% sementara Muara Bungo 0,18%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,41%

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,41% dengan jumlah pengangguran sebesar 80,24 ribu orang. Jumlah pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan Universitas.

Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.034,04 Miliar (16,33%) & Realisasi Belanja Rp4.527,73 Miliar (20,41%)

Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp1.034,04 Miliar atau 16,33% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp4.527,73 Miliar atau 20,41% dari pagu. Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 1.001,39 Miliar (13,97%) dan Belanja Transfer sebesar 3.526,34 Miliar (23,48%). Diproyeksikan Pendapatan akan terealisasi sebesar 6.281,05 Miliar (99,17% dari target) dan belanja diproyeksikan sebesar 20.150,76 Miliar (90,84% dari target).

Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp3.299,23 Miliar (16,48%) & Realisasi Belanja sebesar Rp1.678,44 Miliar (7,9%)

Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp3.299,23 Miliar atau 16,48% dengan tingkat PAD naik sebesar 22,12% dari tahun 2019. Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1.678,44 Miliar atau 7,9% dari pagu. Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp1.180,52 Miliar (10,89%). Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp497,91 Miliar (4,78%). Diproyeksikan Pendapatan akan terealisasi sebesar 15.023,92 (75,07% dari target) dan Belanja akan terealisasi sebesar 21.671,33 (101,95% dari target).

Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp1.784,31 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp3.380,31 Miliar

Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp1.784,31 Miliar, naik 72,33% dari periode sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Perpajakan Konsolidasian yang naik sebesar 83,84%. Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp3.380,31 Miliar atau naik 38,71%.

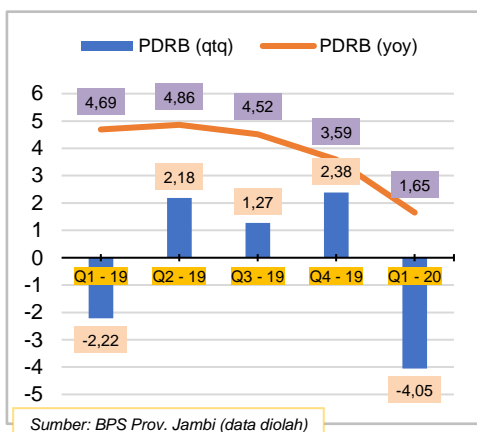


I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Jambi triwulan I tercatat pada angka Rp53.703 Miliar atas dasar harga berlaku (ADHB). Jumlah tersebut membuat perekonomian tumbuh sebesar 1,65% dibanding triwulan I 2019 (yoy) namun turun sebesar -4,05% dibanding triwulan IV 2019 (qtq). Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi 2019 - 2020



PDRB dapat dihitung menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran. Menurut lapangan usaha, periode saat ini yang paling tumbuh signifikan adalah informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan 3,83% (qtq) dan 15,16% (yoy). Sedangkan menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah merupakan sektor dengan laju pertumbuhan terbesar yaitu 12,33% dan menempati urutan ke – 2 dalam sumbangan

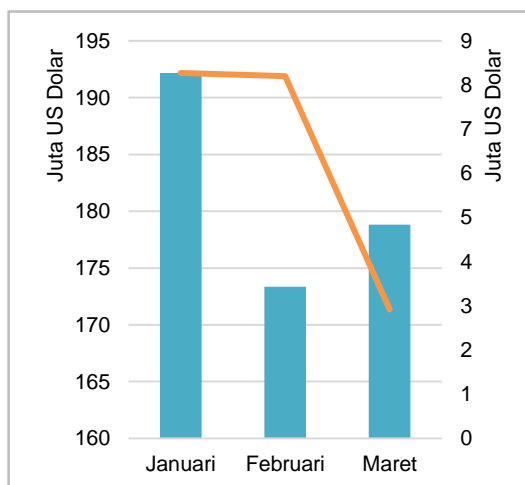
pertumbuhan perekonomian sebesar 0,47%. Sumber pertumbuhan terbesar dihasilkan dari konsumsi rumah tangga dengan sumbangan sebesar 2,13% dan kontribusi sebesar 46,76% dari PDRB.

Provinsi Jambi menempati urutan ke-7 untuk distribusi PDRB regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 6,21%. Provinsi yang mendominasi adalah Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan yang memiliki lumbung energi dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,97%, 22,08% dan 13,45%.

B. Neraca Perdagangan Internasional

Nilai ekspor tercatat secara total sebesar 544,34 Juta US Dolar. Jumlah tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian, industri dan pertambangan. Aktivitas ekspor masih didominasi dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 51,57% dari total ekspor. Sedangkan sektor pertanian justru menjadi satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan jumlah ekspor pada triwulan ini.

Grafik 2 Ekspor – Impor Triwulan I 2020



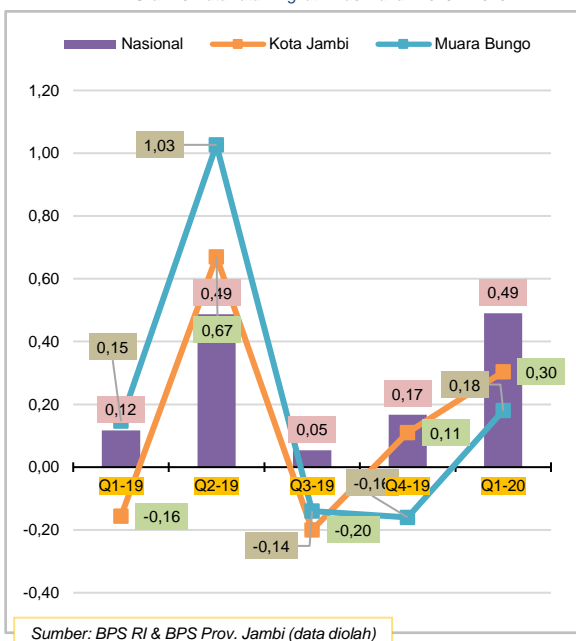


Komoditas utama yang menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total ekspor sebanyak 7.890,34 ton. Sedangkan di sektor industri didominasi dari minyak nabati dengan total ekspor sebanyak 105.707,15 ton. Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak dan gas dengan total ekspor sebanyak 239.242,5 ton. Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar di ekspor ke Singapura yang memiliki pangsa pasar sebesar 49,48%.

Sedangkan dari nilai impor tercatat sebesar 19,36 Juta US Dolar. Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor utama yaitu makanan dan sejenisnya, bahan kimia dan sejenisnya, karet dan sejenisnya, mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya. Sektor yang paling mendominasi adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 10,15 Juta US Dolar atau 52,33% dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan pangsa impor sebesar 21,08%.

C. Inflasi

Grafik 3 Rata-rata Tingkat Inflasi Tahun 2019 – 2020



Inflasi secara umum sangat berfluktuatif dari periode ke periode namun masih berada di bawah level inflasi Nasional. Kota Jambi dan Muara Bungo mengalami inflasi pada bulan Januari dan Februari dengan inflasi terbesar pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Rekreasi, Olahraga dan Budaya. Sementara pada Bulan Maret kedua daerah mengalami deflasi dengan sumbangan terbesar dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Transportasi.

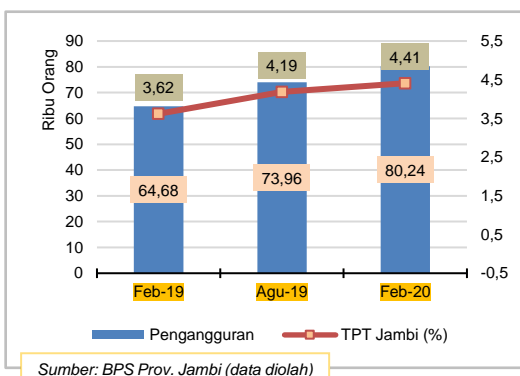
Deflasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli dan pola perilaku masyarakat. Pada Bulan Maret ini mulai diberlakukan pembatasan pada tempat hiburan, tempat permainan anak-anak dan sejenisnya sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang diberhentikan. Kebijakan ini membuat daya beli masyarakat menjadi sangat menurun. Selain itu pada periode yang sama juga mulai diberlakukan jam malam sehingga aktivitas perekonomian yang lebih dominan terjadi di malam hari mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pembatasan juga dilakukan terhadap akses dari dan ke Kota Jambi sehingga sangat mempengaruhi kegiatan usaha transportasi.



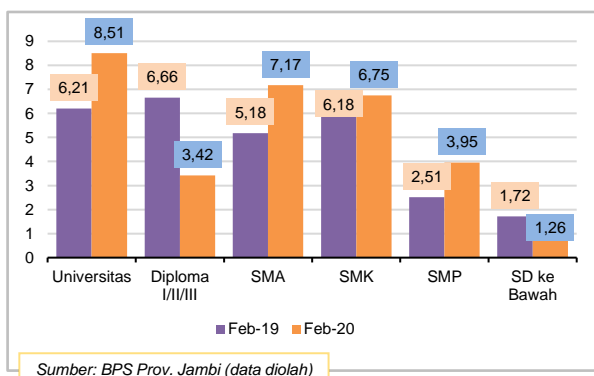
D. Indikator Kesejahteraan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut adalah data TPT Provinsi Jambi per Februari 2020:

Grafik 4 TPT Jambi Tahun 2019-2020



Grafik 5 TPT Menurut Pendidikan



Peningkatan TPT menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang tersedia namun tidak terserap dalam proses produksi. Keadaan ini diperburuk dengan berkurangnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang juga mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 67,56%. TPT cenderung meningkat pada daerah perkotaan dibanding perdesaan.

Sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan serapan sebesar 46,4% dan sektor perdagangan sebesar 16,16%. Sementara di sektor jasa yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki tingkat serapan sangat rendah. Sektor jasa paling besar menyerap tenaga kerja hanya sektor jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan dengan serapan sama yaitu masing-masing sebesar 5,34%.

“dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 15,56 ribu orang. Akan tetapi kenaikan pengangguran lebih rendah dibandingkan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik sebesar 0,79 persen poin menjadi 4,41 persen pada Februari 2020, dibandingkan Februari 2019.” (metrojambi.com)



II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

A. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara

Berikut merupakan informasi APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020:

Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan I Tahun 2020 dan 2019

(dalam Miliar Rupiah)

	TA 2020		TA 2019		Naik/Turun
	Anggaran	Realisasi	Anggaran-P	Realisasi	
A. Pendapatan Negara	6.333,87	1.034,04	5.835,51	660,63	56,52%
I. Penerimaan Dalam Negeri	6.333,87	1.034,04	5.835,51	660,63	56,52%
1. Penerimaan Pajak	5.719,46	895,59	5.499,68	553,83	61,71%
2. PNB	614,41	138,45	335,83	106,80	29,63%
B. Belanja Negara	22.183,76	4.527,73	22.785,88	4.636,37	-2,34%
I. Belanja Pemerintah Pusat	7.167,77	1.001,39	7.353,71	985,54	1,61%
1. Belanja Pegawai	2.519,99	479,29	2.492,31	445,16	7,67%
2. Belanja Barang	2.851,60	320,45	2.995,71	336,17	-4,68%
3. Belanja Modal	1.779,53	201,65	1.846,72	204,21	-1,25%
4. Belanja Bantuan Sosial	16,65	0,00	18,97	0,00	0,00%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	15.015,99	3.526,34	15.432,17	3.650,83	-3,41%
1. Transfer ke Daerah	13.794,15	3.361,31	14.247,61	3.466,34	-3,03%
a. Dana Perimbangan	13.528,08	3.361,31	14.023,74	3.354,40	0,21%
1) Dana Alokasi Umum	8.443,51	2.771,56	8.301,92	2.752,22	0,70%
2) Dana Bagi Hasil	1.626,58	279,00	2.438,08	416,11	-32,95%
3) Dana Alokasi Khusus	3.457,99	310,75	3.283,74	186,07	67,01%
b. Dana Transfer Lainnya	266,07	0,00	223,87	111,94	-100,00%
2. Dana Desa	1.221,84	165,03	1.184,56	184,49	-10,55%
C. Surplus/Defisit	-15.849,89	-3.493,69	-16.950,37	-3.975,74	-12,12%

Sumber: OM SPAN; SIMTRADA (data diolah)

Secara komposisi, APBN di Provinsi Jambi mengalami peningkatan cukup besar untuk mengurangi defisit anggaran. Pengurangan defisit tersebut diwujudkan dalam kebijakan dua arah, yaitu peningkatan target pendapatan dan juga efisiensi belanja. Target pendapatan mengalami peningkatan terutama di sektor perpajakan. Di sisi lain, efisiensi belanja terjadi pada belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Peningkatan belanja hanya terjadi pada pagu belanja pegawai dan dana desa. Belanja pegawai meningkat sebagai dampak dari penerimaan PNS pada tahun yang lalu. Sedangkan peningkatan dana desa terjadi karena terjadi peningkatan alokasi dasar secara nasional. Menurut realisasi, secara umum terjadi peningkatan signifikan pada realisasi penerimaan yang bersumber dari peningkatan pendapatan perpajakan. Sementara untuk realisasi belanja masih memiliki pola yang hampir sama dibandingkan tahun sebelumnya.



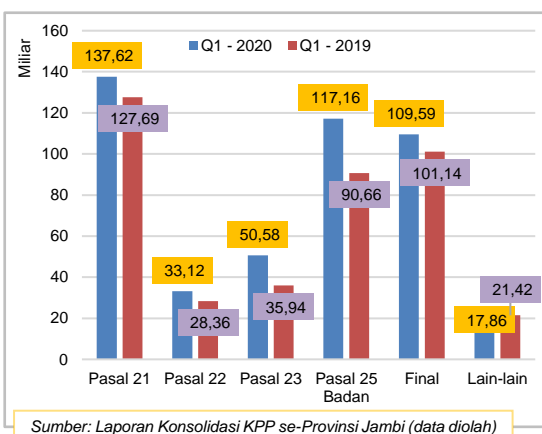
B. Pendapatan Negara

Secara total, pendapatan pada triwulan I 2020 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019. Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Penghasilan (PPH)

Grafik 6 Realisasi PPh Triwulan I Tahun 2019 – 2020



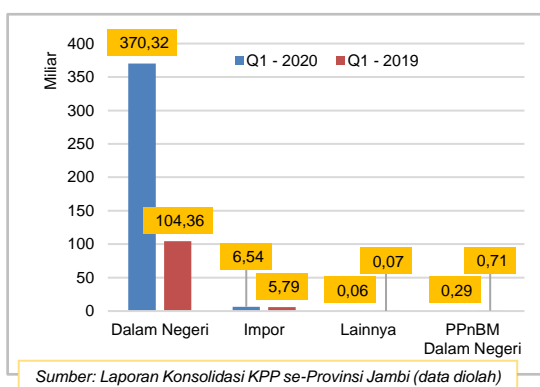
Realisasi PPh periode ini mencapai Rp465,94 Miliar atau naik sebesar 17,1% dibandingkan sebelumnya. Faktor utama peningkatan tersebut adalah harga kelapa sawit yang mulai membaik dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan belanja pegawai pemerintah dan kenaikan tarif upah minimum juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya PPh Pasal 21.

Selain itu juga terjadi perbaikan kinerja pada beberapa Wajib Pajak besar sehingga meningkatkan pendapatan PPh 25 Badan.

b. Pajak Pertambahan Nilai

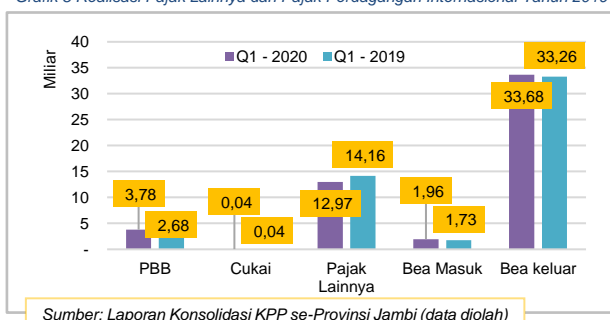
Realisasi PPN mengalami peningkatan dari sebelumnya hingga mencapai Rp377,21 Miliar atau naik sebesar 240,06%. Peningkatan tersebut utamanya juga masih di dukung oleh perbaikan harga komoditas sawit. Selain itu, dari data PDRB sebelumnya juga kita dapat melihat bahwa sumbangan konsumsi rumah tangga juga cukup signifikan dalam memberikan andil dalam penerimaan PPN pada periode ini.

Grafik 7 Realisasi PPN Triwulan I Tahun 2019 – 2020



c. Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional

Grafik 8 Realisasi Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2019 – 2020



Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional naik tipis dari sebelumnya sebesar 1,1% atau Rp52,44 Miliar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain pembelian produk

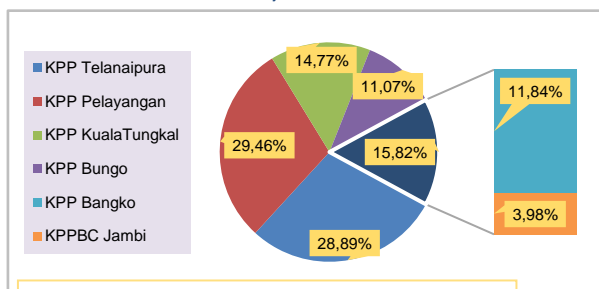


sawit dan turunannya khususnya cangkang sawit masih stabil meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Selain itu nilai kurs dan harga patokan ekspor juga mengalami kenaikan sehingga meningkatkan pendapatan bea keluar yang diterima.

d. Peta Pendapatan Pajak Provinsi Jambi

Peta pendapatan pajak masing-masing KPP dan KPPBC yang ada di Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Grafik 9 Sebaran Penerimaan Pajak & Bea dan Cukai Triwulan I Tahun 2020



Sumber: Laporan Konsolidasi KPP se-Provinsi Jambi (data diolah)

Hingga triwulan I Tahun 2020 ini total penerimaan perpajakan telah mencapai angka sebesar Rp895,59 Miliar atau 15,66% dari target penerimaan perpajakan. Sumbangan penerimaan paling besar terdapat pada KPP

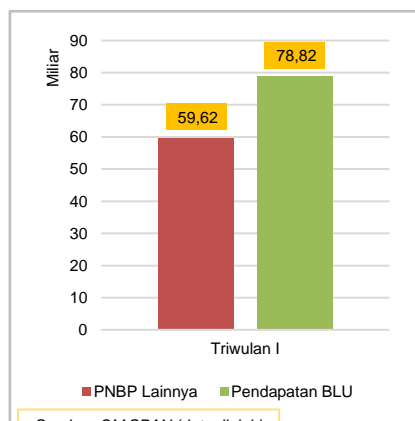
Pratama Telanaipura dan KPP Pratama Pelayangan karena melayani Wajib Pajak yang berada di Kota Jambi yang merupakan Ibukota Provinsi sekaligus pusat perekonomian. Sehingga sumbangan perpajakannya lebih di dominasi oleh PPh dan PPN dari sektor perdagangan dan jasa. Sementara untuk KPP lain lebih di dominasi oleh PPN dan PBB dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Meskipun jumlah ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya, namun diprediksi terdapat penurunan jumlah penerimaan yang cukup signifikan pada periode berikutnya sebagai dampak kebijakan insentif fiskal, relaksasi bagi dunia usaha serta proses *refocusing* dan realokasi belanja pemerintah yang diikuti pula dengan pembebasan pajak untuk jenis kegiatan tertentu sebagai bentuk penanganan pandemi COVID-19.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Penerimaan PNBP

Grafik 10 Realisasi PNBP 2019 – 2020 di Provinsi Jambi



Sumber: OM SPAN (data diolah)

Realisasi PNBP telah mencapai Rp138,44 Miliar atau meningkat sebesar 29,63%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pendapatan BLU yang meningkat sebesar 176,62%. Sedangkan PNBP lainnya meningkat dari periode sebelumnya namun masih didominasi dari penerimaan fungsional Kepolisian Negara R.I. dimana Ditlantas Polda Jambi, Polres Muaro Jambi dan Polres Muara Bungo sebagai kontributor terbesar.

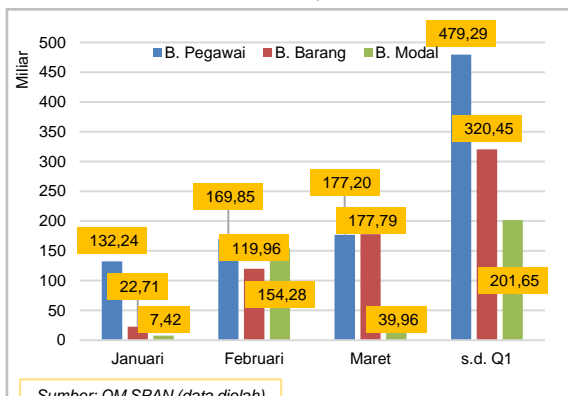


C. Belanja Negara

Secara umum, belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Belanja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 11 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat



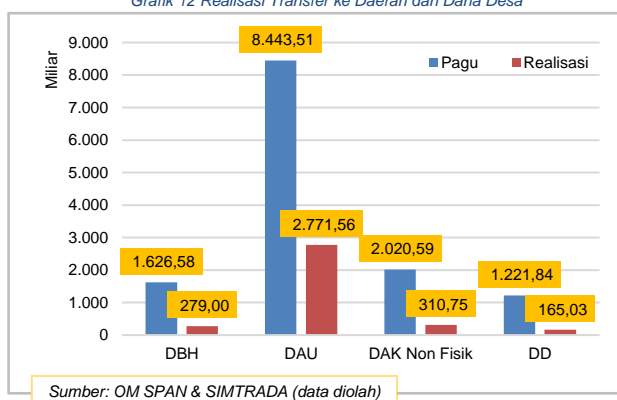
Realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai angka Rp1.001,39 Miliar atau telah terealisasi sebesar 13,97% dari total pagu. Jumlah ini meskipun sedikit meningkat dari periode sebelumnya namun masih belum mencapai target capaian realisasi untuk triwulan I yaitu sebesar 15%.

Beberapa sektor yang masih sangat rendah tingkat penyerapannya adalah belanja barang dan modal yang baru mencapai 11,24% dan 11,33%. Penyerapan yang masih rendah ini mengakibatkan pemberian DIPA yang dilaksanakan lebih cepat menjadi tidak dimanfaatkan dengan baik padahal proses persiapan pengadaan seharusnya sudah bisa dimulai sejak awal tahun. Sementara untuk belanja pegawai merupakan pengeluaran yang sifatnya rutin baik dari komponen gaji, tunjangan kinerja dan sejenisnya. Belanja pegawai ini sedikit meningkat dari sebelumnya yang merupakan dari penambahan PNS baru yang mulai aktif sejak triwulan yang lalu.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah adalah sebesar Rp3.526,24 Miliar atau sebesar 23,48 % dari alokasi pagu. Belum terdapat realisasi DAK Fisik sampai dengan akhir Maret 2020. Namun, hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN, pada tanggal 28 Maret 2020 data kontrak yang telah

Grafik 12 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa



diinput sebanyak 271 kontrak dengan nilai sebesar Rp119.94 Miliar. Sedangkan penyaluran dana desa telah disalurkan sebanyak 344 dari 1.399 desa (24.5%). Rendahnya tingkat penyaluran ini disebabkan karena adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa sesuai Peraturan Menteri



Keuangan No 205 tahun 2020 tentang Perubahan mekanisme penyaluran ini sehingga mengharuskan agar setiap desa yang membuka rekening kas desa wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai *supplier* pada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Wilayah dan KPPN secara terus menerus melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada bulan berikutnya segera terealisasi.

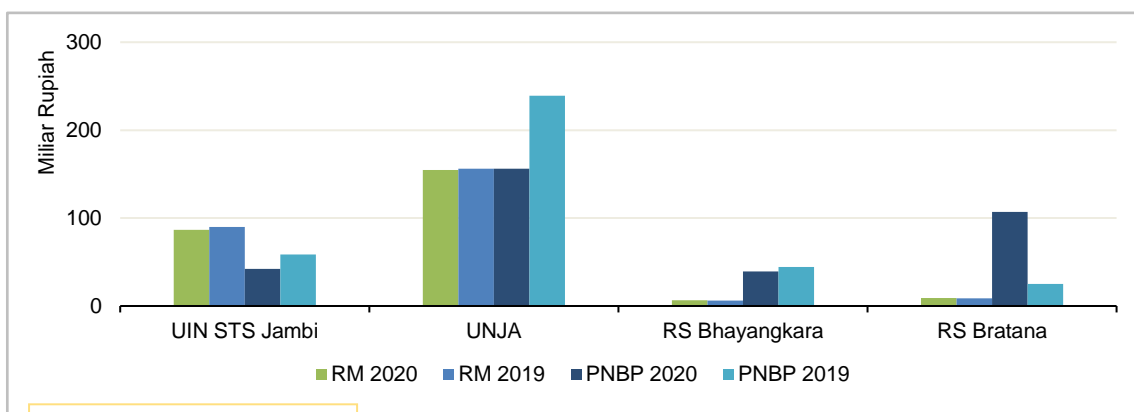
D. Pengelolaan BLU

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, masih terdapat 4 BLU Pusat yang terdapat di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Berikut adalah keempat BLU tersebut:

1. UIN Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Jambi – Bidang Pendidikan;
2. Universitas Jambi (UNJA) – Bidang Pendidikan;
3. Rumah Sakit Bratanata – Bidang Kesehatan;
4. Rumah Sakit Bhayangkara – Bidang Kesehatan.

Perbandingan pagu BLU tersebut untuk tahun 2019 – 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 13 Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Jambi



Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa pagu PNBP mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada periode ini hanya terdapat 1 BLU yang mengalami peningkatan tingkat kemandirian dari tahun 2019 yaitu RS Bratanata dengan peningkatan porsi PNBP dari sebelumnya 73,83% menjadi 92,11%. Sedangkan 3 satker BLU lainnya justru mengalami penurunan tingkat kemandirian yang terlihat dari meningkatnya porsi pagu RM dari tahun sebelumnya.



E. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tabel 2 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020

(dalam Miliar Rupiah)

No	Sektor Usaha	Triwulan I 2020			Triwulan I 2019		
		Akad	Outstanding	Debitur	Akad	Outstanding	Debitur
1	Industri Pengolahan	24,91	23,10	612	14,66	8,26	423
2	Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, & Hiburan	34,07	31,78	799	23,13	12,72	753
3	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,00	0,95	15	0,43	0,22	14
4	Jasa Pendidikan	0,22	0,20	3	0,20	0,14	4
5	Konstruksi	0,00	0,00	0	0,48	0,40	2
6	Penyediaan Akomodasi & Makanan	16,59	15,29	281	8,43	5,95	116
7	Perdagangan Besar & Eceran	216,13	200,03	4.282	227,56	136,53	5.470
8	Perikanan	8,46	8,12	136	7,74	5,87	133
9	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	526,01	504,97	9.392	390,10	260,20	8.612
10	Real Estate, Persewaan & Jasa	1,87	1,77	37	2,18	1,60	32
11	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	4,44	4,31	77	5,26	3,40	107
Total		833,69	790,52	15.634	680,16	435,28	15.666

Sumber: <https://sikap.kemenkeu.go.id>

Jumlah penyaluran KUR mencapai Rp833,69 Miliar dengan debitur sebanyak 15.634. Terdapat peningkatan jumlah penyaluran sebesar Rp153,53 Miliar dimana sebesar Rp135,91 Miliar (88,52%) merupakan kenaikan dari Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan Program KUR terhadap pengembangan sektor unggulan dari Provinsi Jambi. Meski terdapat kenaikan jumlah penyaluran, namun dapat kita katakan bahwa realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jambi masih belum optimal karena masih menempati urutan 6 dan urutan 7 untuk jumlah debitur, untuk lingkup regional Sumatera sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3 Penyaluran KUR Regional Sumatera

(dalam Miliar Rupiah)

No.	PROVINSI	DEBITUR	PENYALURAN	OUTSTANDING
1	Nanggroe Aceh Darussalam	19.730 Orang	688,76	641,78
2	Sumatera Utara	57.148 Orang	2.106,68	1.975,99
3	Sumatera Barat	35.047 Orang	1.463,72	1.370,51
4	Riau	23.790 Orang	1.177,11	1.104,58
5	Jambi	15.634 Orang	833,69	790,52
6	Sumatera Selatan	25.545 Orang	1.117,76	1.047,91
7	Bengkulu	14.065 Orang	608,40	551,42
8	Lampung	51.802 Orang	1.399,63	1.301,16
9	Kepulauan Bangka Belitung	5.927 Orang	229,15	215,45
10	Kepulauan Riau	7.301 Orang	344,61	304,45



Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR, Kanwil telah berupaya dengan mengadakan sosialisasi Penyaluran KUR Tahun 2020 ke beberapa Kabupaten (Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat). Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menggugah pemerintah daerah untuk lebih aware dalam memberi dukungan dan mendorong akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing dalam iklim usaha yang kompetitif.

F. Prognosis Realisasi APBN

Realisasi Pendapatan hingga akhir tahun 2020 pada Provinsi Jambi diperkirakan mencapai Rp6,28 Triliun (99,17% dari pagu) sedangkan Belanja diperkirakan akan mencapai angka Rp20,15 Triliun (90,84% dari pagu) pada akhir tahun 2020. Prediksi ini mempertimbangkan produksi dan penjualan sawit sebagai salah satu penyumbang besar di Provinsi Jambi yang tetap dapat stabil pada triwulan ini. Selain itu juga diharapkan harga produk sawit dan turunannya dapat terus membaik seiring dengan kondisi perekonomian dunia yang diharapkan mulai membaik pada triwulan II dan III.

Selain itu, salah satu faktor yang juga sangat menentukan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan untuk kembali menghidupkan perekonomian yang melambat karena pengaruh pandemi COVID 19 yang terjadi sejak pertengahan triwulan I. Di prediksi status darurat pandemi ini akan berlanjut hingga September 2020 sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk dapat mengimbangi penurunan aktivitas perekonomian dan penurunan pendapatan perpajakan karena insentif yang diberikan. Berikut adalah proyeksi Realisasi APBN hingga akhir tahun 2020:

Tabel 4 Proyeksi APBN pada Prov. Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2020

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Rp Realisasi s.d. Tw I	% Realisasi s.d. Tw I	Rp Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV	% Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV
Pendapatan	6.333,87	1.034,04	16,33%	6.281,05	99,17%
Belanja	22.183,76	4.527,73	20,41%	20.150,76	90,84%
Surplus/Defisit	-15.849,89	-3.493,69		-13.869,71	

Keterangan: proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah



III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Provinsi Jambi:

Tabel 5 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I TA 2019 dan 2020

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pagu 2020	Realisasi 2020	Pagu 2019	Realisasi 2019
A. Pendapatan	20.014,37	3.299,23	19.142,50	4.052,82
I. Pendapatan Asli Daerah	3.066,68	736,72	2.843,47	603,27
1. Pendapatan Pajak Daerah	1.954,89	372,88	1.787,02	358,07
2. Pendapatan Retribusi Daerah	143,70	29,54	126,51	20,05
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	135,02	229,99	129,05	118,53
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	833,07	104,31	800,88	106,61
II. Dana Perimbangan	13.802,90	2.491,09	13.781,34	3.147,58
1. DBH Pajak Bukan Pajak	1.907,05	199,72	3.662,30	756,70
2. Dana Alokasi Umum	8.494,52	2.226,53	7.931,89	2.342,29
3. Dana Alokasi Khusus	3.370,36	64,84	2.096,85	48,59
4. Dana Insentif Daerah	30,98	0,00	90,30	0,00
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.144,79	71,42	2.517,68	301,97
B. Belanja	20.347,73	1.617,34	19.910,58	1.435,99
1. Belanja Pegawai	6.774,61	935,78	7.794,83	924,22
2. Belanja Barang dan Jasa	4.426,81	319,35	4.160,71	272,95
3. Belanja Modal	5.080,75	117,46	4.360,91	35,71
4. Belanja Bunga	1,00	2,63	0,00	0,00
5. Belanja Subsidi	14,01	4,04	15,34	7,67
6. Belanja Hibah	852,69	71,31	663,08	30,20
7. Belanja Bantuan Sosial	58,33	40,82	57,14	21,60
8. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	664,56	76,46	632,13	43,69
9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa	2.246,35	27,70	2.143,70	95,45
10. Belanja Tidak Terduga	228,62	21,80	80,67	4,50
11. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	2,06	0,00
Surplus (Defisit)	(333,36)	1.681,89	(768,08)	2.616,83

Sumber: SIKD (data diolah)

Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar 16,48% dari total pagu pendapatan daerah. Jumlah realisasi tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya yang juga merupakan dampak lanjutan dari berkurangnya belanja transfer ke daerah. Indikasi ini menunjukkan masih signifikannya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana dari pusat. Dan kondisi ini masih belum dapat diimbangi rendahnya jumlah PAD meskipun sudah menunjukkan tren peningkatan.



B. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan triwulan I tahun 2020 mencapai 24,02% dari total target PAD, naik tipis dari persentase capaian pada periode yang sama di tahun 2019 yang hanya mencapai 21,22%. Rincian capaian PAD tersebut sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Grafik 14 Pagu dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Pemda

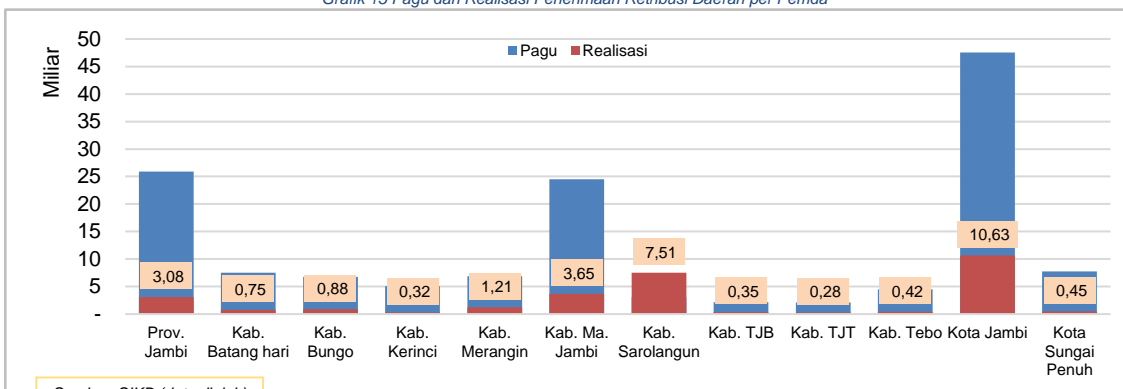


Sumber: SIKD (data diolah)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (agregat) mencapai 19,07% dari target atau sebesar Rp372,88 Miliar. Jumlah ini tumbuh sebesar 4,14% dari periode sebelumnya. Pendapatan pajak daerah masih sangat didominasi oleh Provinsi Jambi dan Kota Jambi dan bersumber dari pendapatan pajak kendaraan bermotor, BPHTB, pajak restoran dan pajak penerangan jalan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Grafik 15 Pagu dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Pemda



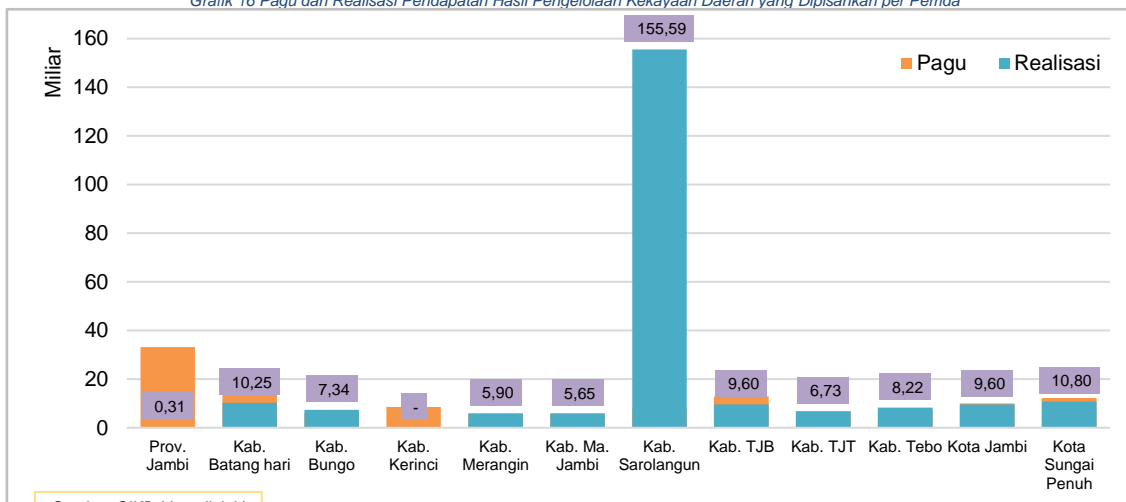
Sumber: SIKD (data diolah)

Pendapatan Retribusi (agregat) mencapai Rp29,54 Miliar atau 20,56% dari target dengan pertumbuhan sebesar 47,36%. Retribusi Daerah tidak hanya didominasi oleh Kota Jambi dan Provinsi Jambi tapi juga Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan daerah yang paling dekat dengan Kota Jambi. Sumber utama retribusi berasal dari jasa usaha, jasa kesehatan, jasa umum dan izin tertentu.



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Grafik 16 Pagu dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda

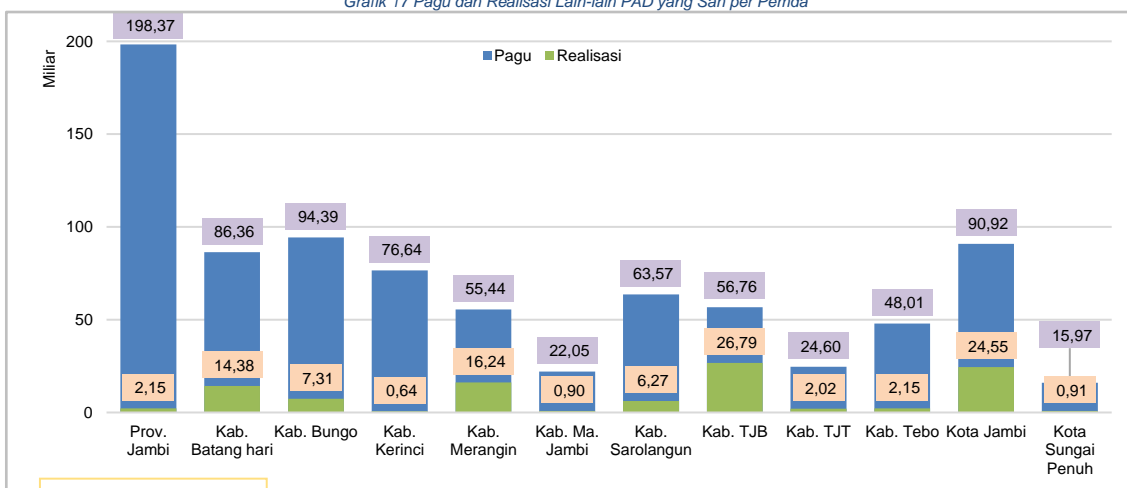


Sumber: SIKD (data diolah)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari seluruh Pemerintahan Daerah yang ada di Provinsi Jambi telah mencapai Rp229,99 Miliar atau telah mencapai 170,34% dari target. Jumlah ini ditopang oleh penerimaan yang sangat signifikan oleh Kabupaten Sarolangun yang mampu mencapai 1.944,82% yang berasal dari dividen atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD sebagai bagian dari bentuk investasi pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat beberapa Pemda yang telah melebihi target seperti Bungo, Merangin dan Tebo.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Grafik 17 Pagu dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda

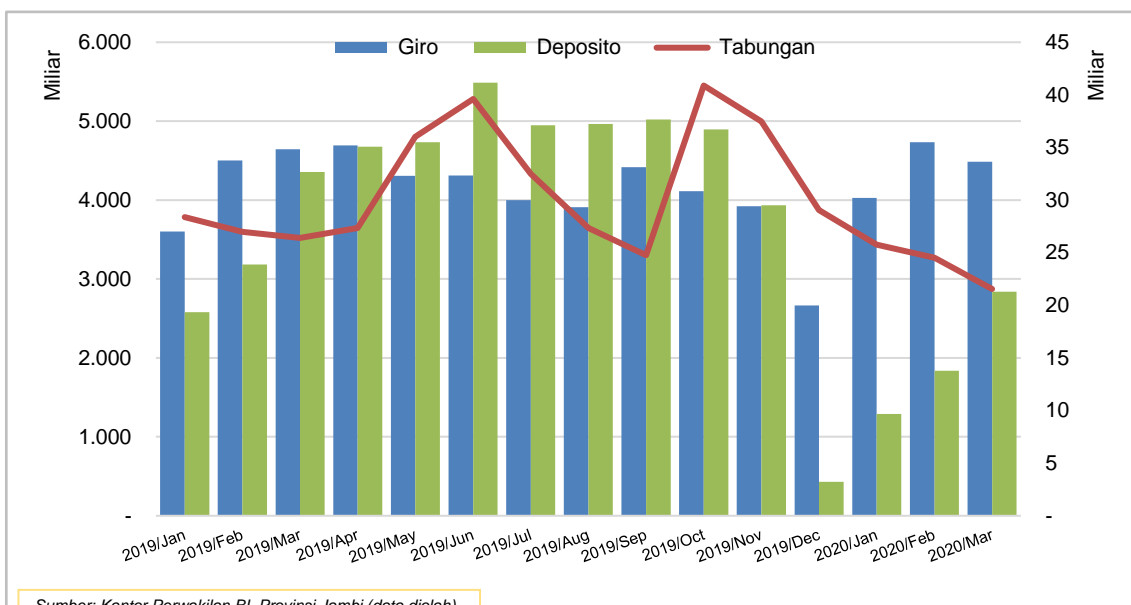


Sumber: SIKD (data diolah)

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah secara agregat untuk wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar Rp104,31 Miliar atau mencapai 14,31% dari target. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah ini umumnya didominasi oleh pendapatan BLUD, denda, jasa giro dan bunga deposito.



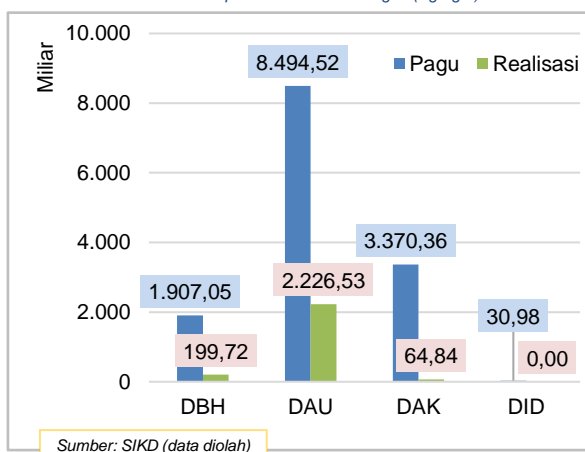
Grafik 18 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Januari 2019 – Maret 2020



Menurut data Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Indonesia, posisi per 31 Maret 2020 menunjukkan Giro, Deposito dan Tabungan Pemda mencapai Rp4,48 Triliun, Rp2,84 Triliun dan Rp21,55 Miliar. Analisa 1 tahun terakhir menunjukkan jumlah ini menunjukkan tren yang menurun. Hal ini merupakan indikasi bahwa Kebijakan Pemda untuk menempatkan *idle money* dalam bentuk deposito ini mulai berkurang sehingga diharapkan Pemerintah Daerah lebih dapat memanfaatkan kelebihan dana ini untuk melaksanakan program yang dapat menjadi stimulus bagi perekonomian masyarakat.

2. Dana Perimbangan

Grafik 19 Komposisi Dana Perimbangan (Agregat)



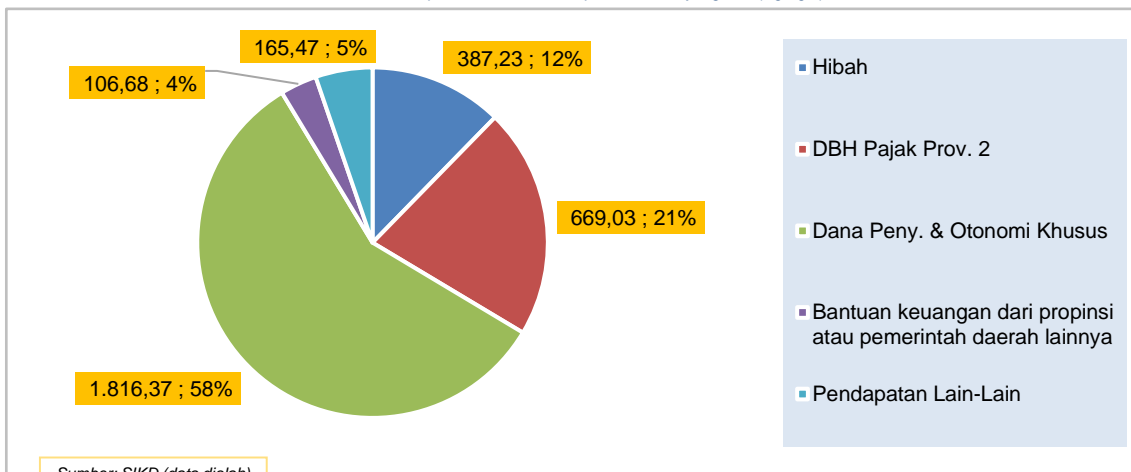
Data LRA seluruh Pemda s.d. Triwulan I tahun 2020 menunjukkan realisasi pendapatan transfer secara agregat mencapai Rp2.491,09 Miliar. Pendapatan terbesar diperoleh dari DAU yang diberikan bulanan. Sedangkan untuk realisasi DAK masih sangat rendah dan DID masih belum terealisasi.



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Nilai realisasi dan capaian segara agregat s.d. Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp71,42 Miliar. Jumlah ini hanya menyumbang 2,16% dari keseluruhan pendapatan daerah secara agregat. Komponen terbesar pendapatan ini masih bergantung pada dana penyesuaian dan dana bagi hasil yang artinya masih sangat bergantung pada pemerintahan daerah lain.

Grafik 20 Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Agregat)

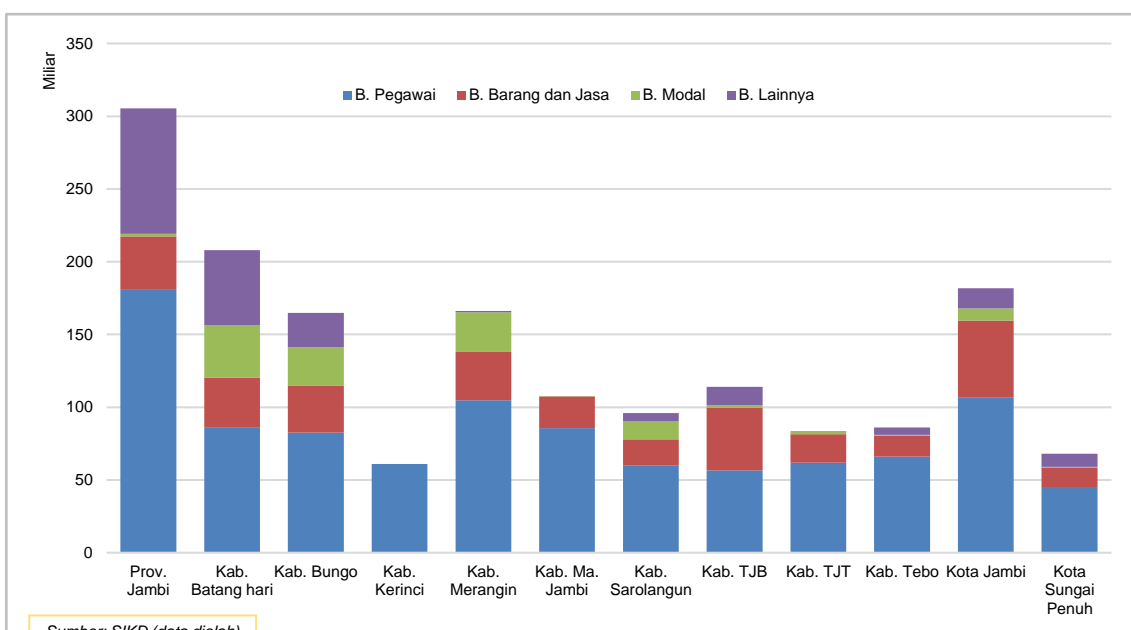


C. Belanja Daerah

Belanja Daerah mengalami meningkat sebesar 7,9% pada periode ini. Peningkatan ini juga terjadi pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Berikut rincian realisasi belanja tersebut:

1. Realisasi Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 21 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja per Pemda





Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah secara umum masih sangat lambat dalam melaksanakan realisasi belanja modal. Bahkan masih terdapat pemerintah daerah yang sama sekali belum melaksanakan realisasi belanja barang dan belanja modal.

Kendala yang dihadapi secara umum masih sama dari periode ke periode yaitu belum terbentuknya tim pengadaan, belum matangnya perencanaan pengadaan dan sebagainya. Tren penyerapan saat ini masih sangat lambat di triwulan I dan baru akan menumpuk di triwulan IV.

D. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Tabel 6 Proyeksi APBD (agregat) Provinsi Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2020

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Rp Realisasi s.d. Tw I	% Realisasi s.d. Tw I	Rp Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV	% Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV
Pendapatan	20.014,37	3.299,23	16,48%	15.023,92	75,07%
Belanja	20.347,73	1.617,34	7,95%	21.501,27	105,67%
Surplus/Defisit	-333,36	1.681,89		-6.477,35	

Pendapatan dan Belanja Daerah Agregat s.d. akhir tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp15.023,92 Miliar (75,07% dari target pendapatan) dan Rp21.671,33 Miliar (101,95% dari target belanja). Proyeksi tersebut belum mempertimbangkan guncangan ekonomi yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Namun diperkirakan realisasi belanja akan mengalami percepatan karena tuntutan penyegeraan realisasi terutama belanja yang kaitannya dengan penanganan COVID-19.



IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Tabel 7 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2020 dan 2019

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2020				2019
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	1.002,01	3.540,94	1.784,31	72,33%	1.035,38
Pendapatan Perpajakan	863,56	405,95	1.269,51	83,84%	690,54
Pendapatan Bukan Pajak	138,45	3.135,00	514,80	63,01%	315,80
Hibah	0,00	0,29	0,29	-47,27%	0,55
Transfer	0,00	2.758,64	0,00	-100,00%	28,50
Belanja Negara	4.527,73	1.611,21	3.380,31	38,71%	2.436,96
Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	1.001,39	1.592,06	2.593,45	10,77%	2.341,24
Transfer	3.526,34	19,15	786,85	721,95%	95,73
Surplus (Defisit)	-3.525,72	1.929,73	-1.595,99	13,87%	-1.401,58

Sumber: GFS (data diolah)

Dapat terlihat pada tabel di atas, realisasi penerimaan konsolidasian lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong dengan meningkatnya peningkatan jumlah pendapatan baik dari perpajakan maupun bukan pajak. Sementara dari sisi belanja juga mengalami peningkatan yang disumbang dari peningkatan tajam pada belanja transfer daerah. Tingginya jumlah penyaluran ini sebagian besar ditopang dari belanja DAU dan DAK Non Fisik. Sementara untuk belanja DAK Fisik, DID dan Dana Desa masih sangat rendah.

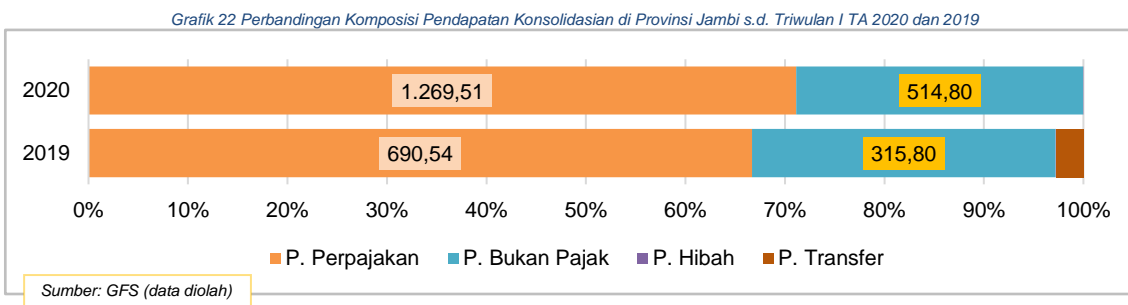
B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Pemerintah Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).



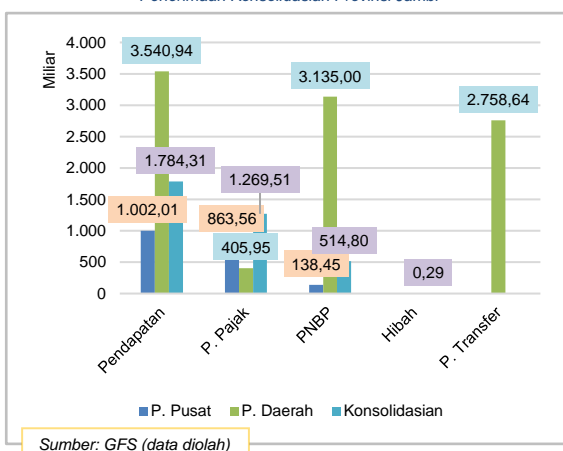
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan konsolidasian pada periode yang sama. Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi pendapatan konsolidasian s.d. triwulan I 2020 sebesar Rp1.784,31 Miliar. Berdasarkan komposisinya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, terdapat penurunan yang cukup signifikan antara proporsi pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak.

Grafik 23 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi



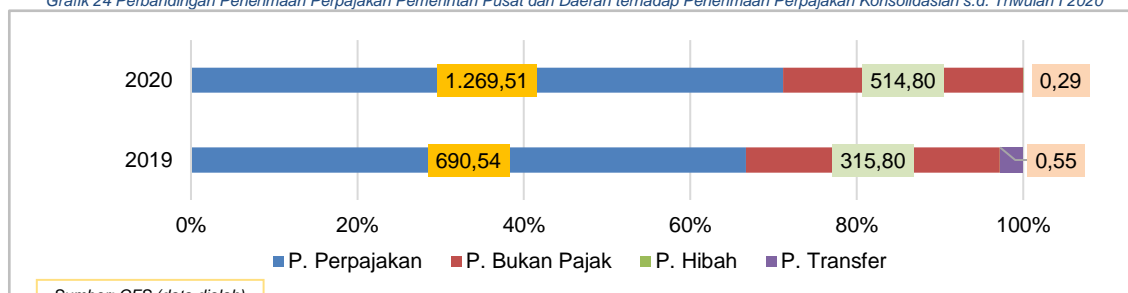
Berikutnya, jika pendapatan konsolidasian ditelaah lebih lanjut maka akan terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer. Total pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp1.002,01 Miliar, sedangkan dana transfer ke daerah mencapai Rp2.758,64 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran.

Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran masing-masing daerah sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.



2. Analisis Perubahan

Grafik 24 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan I 2020



Dibandingkan pada periode sebelumnya, pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi pendapatan konsolidasian sebesar 72,33% dari Rp1.035,38 Miliar menjadi Rp1.784,31 Miliar. Peningkatan tersebut ditopang dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh. Sementara itu, peningkatan PNPB Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN/D dalam bentuk dividen.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 8 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020 dan 2019

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2020		2019	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Pendapatan Perpajakan	1.269,51	84%	690,54	36%
Pendapatan Bukan Pajak	514,80	63%	315,80	2339%
Hibah	0,29	-47%	0,55	0%
Transfer	0,00	-100%	28,50	0%
Total	1.784,31	72%	1.035,38	371%
PDRB	53.703,00	1%	53.320,00	6%

Sumber: GFS (data diolah)

Pada triwulan ini, PDRB tercatat sejumlah Rp53.703 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,65% (yoy). Sedangkan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yaitu Belanja Pemerintah hanya memberikan kontribusi sebesar 0,47% dan hanya berperan sebesar 4,69% atas PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi Jambi masih perlu diberikan stimulus melalui belanja pemerintah namun tidak menjadi penopang utama dalam perekonomian.

Namun demikian, peningkatan perekonomian ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian masih tetap berjalan baik dan penerimaan negara telah dioptimalkan sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan dalam kondisi normal ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih banyak sektor yang belum tergalai agar pendapatan baik perpajakan maupun non pajak dapat lebih dioptimalkan.



C. Belanja Konsolidasian

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Berikut adalah data belanja konsolidasian untuk periode triwulan I tahun 2020 dan 2019:

Tabel 9 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2020 dan 2019

(dalam Miliar Rupiah)

Jenis Belanja Konsolidasian	2020	2019	Komposisi 2020	Komposisi 2019	Naik/Turun
B. Pegawai	1.449,27	8.722,76	42,87%	39,60%	-83,39%
B. Barang dan Jasa	701,77	5.952,79	20,76%	27,02%	-88,21%
B. Modal	319,12	4.822,43	9,44%	21,89%	-93,38%
B. Subsidi	5,38	17,49	0,16%	0,08%	-69,24%
B. Hibah	72,64	702,51	2,15%	3,19%	-89,66%
B. Bansos	22,83	50,09	0,68%	0,23%	-54,42%
B. Tak Terduga	22,45	11,04	0,66%	0,05%	103,35%
B. Transfer	786,85	1.748,91	23,28%	7,94%	-55,01%
Total Belanja Konsolidasian	3.380,31	22.028,01	100,00%	100,00%	-84,65%

Sumber: GFS (data diolah)

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan jenis belanja, belanja barang dan belanja modal terjadi penurunan drastis dengan porsi 20,76% dan 9,44% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Rendahnya realisasi belanja modal ini mengindikasikan bahwa masih banyak belanja yang seharusnya sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur menjadi belum terserap. Padahal seharusnya pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada jenis kegiatan yang mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian salah satunya pada infrastruktur tersebut. Lambatnya realisasi belanja modal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dapat semakin melambat atau bahkan tidak terjadi pertumbuhan sama sekali.

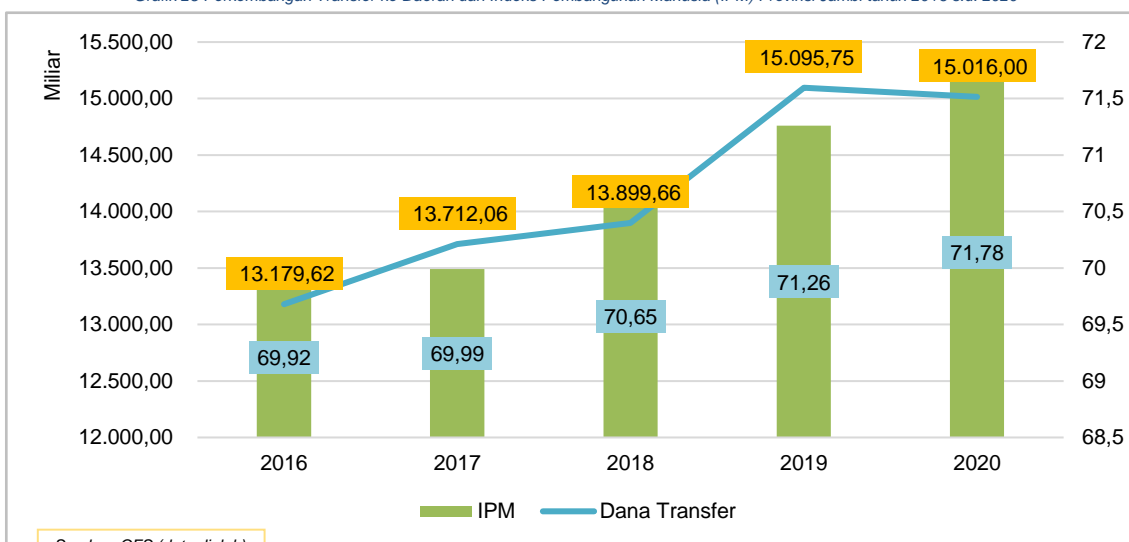


2. Analisis Perubahan

Terjadi perubahan yang sangat besar dari sisi jumlah belanja konsolidasian. Perbedaan paling besar terdapat pada proporsi belanja modal yang mengalami perbedaan signifikan yaitu hanya 9,44% di tahun 2020 sedangkan mampu mencapai 21,89% di tahun 2019. Selain itu juga komposisi Belanja Transfer mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 23,28% pada tahun 2020 sedangkan 2019 hanya 7,94%. Rendahnya penyerapan belanja modal disebabkan karena masih belum terlaksananya proses pengadaan terutama untuk yang sifatnya pembangunan fisik. Padahal seharusnya proses perencanaan sudah bisa dimulai sejak diterima DIPA pada tahun yang lalu namun pada pelaksanaannya masih sangat sedikit sekali yang sudah menjalankan. Sedangkan peningkatan belanja transfer ditopang sebagian besar dari realisasi DAU, DAK Non Fisik dan Dana Desa.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Grafik 25 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2016 s.d. 2020



Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat di Provinsi Jambi sejalan dengan kebijakan *money follow program* untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam IPM. Hal ini ditandai juga dengan besaran pagu DAK Fisik dan Dana Desa yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah dana transfer yang akan dikucurkan pada tahun ini, namun diharapkan indeks pembangunan manusia tetap dapat terjaga sehingga tidak terjadi penurunan yang signifikan. Tentunya akan jauh lebih bagus jika indeks tersebut dapat meningkat, yang artinya pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan program yang membangun masyarakat sehingga dengan dana yang lebih sedikit namun dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.



4. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional **C** = Konsumsi Rumah Tangga **I** = Investasi
G = Belanja Pemerintah **X** = Ekspor **M** = Impor

Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap PDRB. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Data Belanja, PMTB dan PDRB Triwulan I 2020
(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi
Belanja Konsolidasian	3.064,95
PMTB	3.250,86
PDRB	53.703

Sumber: GFS (data diolah)

Dari tabel di atas, kita dapat menghitung peran belanja pemerintah (G) dan Investasi (I). Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian / PDRB x 100%

Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi Jambi hanya mencapai 5,71%. Dengan melihat angka tersebut, kontribusi belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jambi. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai stimulus dalam perekonomian. Oleh karena itu, belanja pemerintah selalu diharapkan terserap secara teratur dan tidak hanya menumpuk di akhir tahun. Tujuannya adalah agar perekonomian dapat terus bertumbuh dengan adanya stimulus yang dimunculkan dari aktivitas belanja pemerintah.

**b. Peran Investasi Pemerintah (I) = $\text{PMTB} / \text{PDRB} \times 100\%$**

Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi sebesar 5,97% terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Meskipun tidak memiliki kontribusi yang besar, namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam perannya sebagai pengungkit dalam perekonomian. Meskipun pada triwulan ini belum memiliki nilai yang tinggi, pemerintah diharapkan ke depannya agar lebih memperhatikan pelaksanaan investasi sehingga dapat mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Realisasi belanja yang terkonsentrasi hanya pada triwulan III dan IV akan berakibat pada minimnya kontribusi belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi.

Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer. Sehingga ketika terjadi *shock* pada harga dan permintaan komoditas unggulan seperti minyak bumi, gas, batu bara, karet dan CPO akan berdampak langsung pada perekonomian dan mempengaruhi laju pertumbuhan. Melihat kondisi harga komoditas sawit dan karet yang masing sangat fluktuatif hingga triwulan I tahun 2020 ini, peran pengeluaran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga perekonomian Jambi dapat terus tumbuh. Peran ini semakin vital karena pada periode yang akan datang, kondisi dapat semakin buruk karena merebaknya pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas ekonomi hampir terhenti sehingga sangat dibutuhkan dukungan fiskal yang tepat untuk kembali dapat menggerakkan roda perekonomian khususnya di Provinsi Jambi.



V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Sektor Perkebunan Sebagai Salah Satu Sektor Unggulan Provinsi Jambi

Potensi perkebunan merupakan aset dan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi Sub Sektor perkebunan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 649.959 Kepala Keluarga. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Dan menyumbang sebesar 29,43% dari total PDRB. Sehingga menjadi andalan untuk menyejahterakan petani dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk sektor pertanian komoditas sub sektor perkebunan yang sangat dominan adalah Karet dan Kelapa Sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yakni 791.025 hektar, Perkebunan rakyat 66,66%, perkebunan Negara 3,01%, perkebunan swasta 30,33%.

Nilai produksi kelapa sawit sebesar 898,24 ribu ton per tahun, dipasok untuk 57 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada 53 Perusahaan Perkebunan, dengan total izin yang diterbitkan untuk pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 2.767 Ton/TBS/Jam.

Saat ini harga TBS sawit dengan usia tanaman tiga tahun Rp 1.670,09/Kg. Harga TBS sawit tersebut naik Rp 17,67/kg 1,1 persen dibandingkan harga TBS sawit usia tanaman tiga tahun di Jambi dua pekan lalu Rp 1.652,42/Kg. Sedangkan harga TBS sawit usia tanaman 10 – 20 tahun naik dari Rp 2.101,52/kg dua pekan lalu menjadi Rp 2.127,76/Kg atau naik Rp 26,24/Kg (1,25 persen).

Meningkatnya harga TBS sawit saat ini dipengaruhi harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) di pasaran nasional yang tergolong tinggi. Harga CPO di pasaran nasional saat ini mencapai Rp 9.399,41/Kg, harga kernel sawit Rp 5.873,58/Kg dengan indeks Kumulatif (K) mencapai 89,94 persen. Tahun 2020 menjadi harapan besar bagi industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya perkebunan sawit terhadap perbaikan harga TBS setelah melewati masa-masa berat di 2019 lalu. Dengan menguatnya harga TBS pada awal 2020 mampu kembali membangkitkan motivasi petani untuk meningkatkan intensitas kegiatan pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit yang dikelola

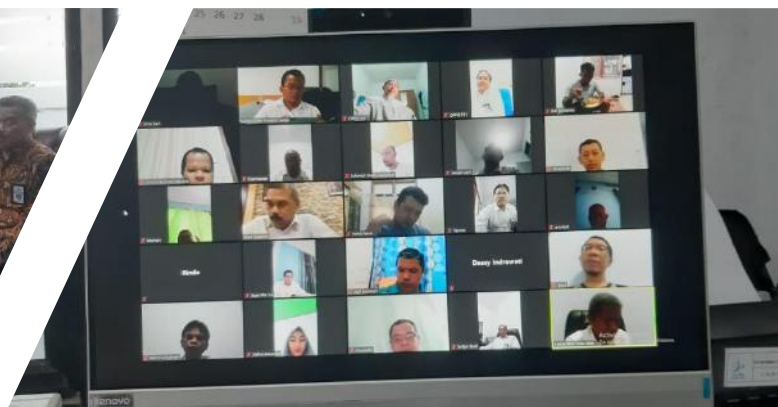
Selain CPO komoditas cangkang sawit juga menembus pasar global. Selain laris di Jepang, cangkang sawit juga telah menembus ke 3 negara mitra dagang lainnya yakni Korea Selatan, Belanda dan Thailand.



Kelapa Sawit diperkenalkan di Provinsi Jambi sekitar tahun 1982 sampai 1983 melalui pola Perkebunan inti Rakyat (PIR), sehingga banyak area kelapa sawit yang telah memasuki masa peremajaan. Peremajaan kelapa sawit menjadi persoalan yang penting dan harus segera diwujudkan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan produktivitas, maka pendapatan petani pun meningkat, dan dengan demikian diharapkan akan memberikan multiplier effect yang positif terhadap kesejahteraan petani dan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Saat ini, pemerintah telah menyediakan skema khusus melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani dalam pengelolaan peremajaan kelapa sawitnya, pembiayaan KUR untuk peremajaan memang diperlukan, sebab bantuan pendanaan yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 25 Juta per hektar belum cukup.



#dirumahaja



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45 Telanaipura Kota Jambi 36122

Telp. (0741) – 668802 | Fax (0741) – 668801

Email : kanwil.jambi@gmail.com

Website: djpb.go.id/kanwil/jambi